



Analisis Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang

Siti Zahra¹, Nadia Khumairatun Nisa², Aulia Nasywa Alifah³, Hanifa Dwi Hijria⁴, Harlida Aliya Putri⁵, Alinda Nur Rizki Kurnita⁶

¹⁻⁶ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Alamat : Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
Negara Indonesia, Kode Pos 42163

Email : arazahra702@gmail.com , nadia.khumairatun@untirta.ac.id ,
aulianasyiwa1@gmail.com , hanifahijri@gmail.com , harlidaaliya@gmail.com ,
alienrzk@gmail.com

Penulis korespondensi : arazahra702@gmail.com

Abstract. *Transparent and accountable regional financial management is one of the essential principles in achieving good governance. This study aims to analyze the implementation of transparency and accountability in regional financial management at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Tangerang Regency. This research employed a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with five informants consisting of the Head of General Affairs and Personnel Subdivision, Accounting Staff, Regional Government Information System (SIPD) Operator, Budget Division Staff, and the Information and Documentation Management Officer (PPID) of BPKAD Tangerang Regency. The interviews were conducted on June 3, 2026. The results show that transparency in regional financial management has been implemented through the provision of public information, the utilization of SIPD, and information services managed by PPID. Meanwhile, accountability is reflected in the preparation of financial reports in accordance with Government Accounting Standards (SAP), budget management that follows established procedures, as well as supervision and follow-up actions on audit findings. Supporting factors in the implementation of transparency and accountability include the use of information technology, the implementation of SIPD, and coordination among divisions. However, several obstacles were identified, including delays in data submission, technical issues within the system, and the limited public understanding of regional financial information. Overall, the implementation of transparency and accountability in regional financial management at BPKAD Tangerang Regency has been carried out quite well, although several aspects still need improvement.*

Keywords: *Transparency, Accountability, Regional Financial Management, BPKAD, SIPD.*

Abstrak. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu prinsip penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap lima informan yang terdiri dari Kasubag Umum dan Kepegawaian, Staf Bidang Akuntansi, Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Staf Bidang Anggaran, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPKAD Kabupaten Tangerang. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan melalui penyediaan informasi publik, pemanfaatan SIPD, dan layanan informasi yang dikelola oleh PPID. Sementara itu, akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengelolaan anggaran yang mengikuti prosedur, serta pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Faktor pendukung dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas meliputi pemanfaatan teknologi informasi, penggunaan SIPD, dan koordinasi antarbidang. Adapun faktor penghambat yang ditemukan antara lain keterlambatan penyampaian data, kendala teknis sistem, serta masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan daerah. Secara keseluruhan, implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BPKAD

Naskah Masuk: 12 januari 2026; Revisi: 25 februari 2025; Diterima: 12 maret 2026; ; Terbit: 26 juni 2026.

Kabupaten Tangerang telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki.

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Daerah, BPKAD, SIPD.

1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip *good governance*, terutama transparansi dan akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2018), transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dalam konsep *good governance*, transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi publik, sedangkan akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat (UNDP, 1997). Oleh karena itu, kedua prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya publik.

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan *digital governance* melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). OECD (2021) menjelaskan bahwa teknologi digital dapat meningkatkan keterbukaan informasi dan kualitas pelayanan publik. Penelitian Nasution dan Si (2021) serta Manoe et al. (2023) juga menunjukkan bahwa SIPD berperan dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih terintegrasi, sistematis, dan efektif.

BPKAD Kabupaten Tangerang sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan hasil wawancara, transparansi dilakukan melalui pemanfaatan SIPD, website pemerintah daerah, dan layanan informasi publik yang dikelola PPID. Sementara itu, akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan, pengawasan penggunaan anggaran, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan daerah.

Meskipun demikian, implementasi transparansi dan akuntabilitas masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kendala teknis dalam penggunaan sistem informasi, keterlambatan penyampaian data dari perangkat daerah, serta keterbatasan

pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel masih memerlukan perbaikan dan penguatan dalam pelaksanaannya.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan daerah maupun efektivitas penerapan SIPD. Namun, penelitian yang mengkaji implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Tangerang melalui pendekatan kualitatif dengan perspektif Teori Stewardship masih terbatas. Teori Stewardship yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991) memandang pemerintah sebagai *steward* yang bertanggung jawab mengelola sumber daya publik demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Tangerang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

2. Tinjauan Pustaka

Landasan teori utama dalam penelitian ini menggunakan Teori Stewardship yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis. Teori ini menjelaskan bahwa seorang pengelola organisasi (*steward*) pada dasarnya akan bertindak untuk mencapai tujuan organisasi dan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadinya. Berbeda dengan Teori Agency yang menekankan adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*, Teori Stewardship memandang bahwa pengelola memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya (Donaldson & Davis, 1991, <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>).

Pengembangan Teori Stewardship dilakukan oleh Davis, Schoorman, dan Donaldson yang menjelaskan bahwa perilaku seorang *steward* dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosiologis, seperti loyalitas terhadap organisasi, kebutuhan untuk berprestasi, serta tanggung jawab moral dalam menjalankan tugasnya (Davis, Schoorman, & Donaldson, 1997, <https://doi.org/10.2307/259223>). Oleh karena itu, teori ini menekankan pentingnya kepercayaan, integritas, komitmen organisasi, dan orientasi pada kepentingan bersama sebagai dasar dalam menjalankan suatu organisasi.

Dalam konteks sektor publik, Teori Stewardship relevan digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dipandang sebagai

pihak yang memperoleh amanah untuk mengelola sumber daya publik demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab agar kepercayaan masyarakat dapat terjaga.

Menurut Mardiasmo (2018), pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah, sedangkan akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan, pengawasan penggunaan anggaran, serta pertanggungjawaban atas setiap kebijakan yang diambil. Kedua prinsip tersebut juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana dikemukakan oleh UNDP (1997).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Astuti, Ilham, dan Madjid (2024) menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ([https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(1\).17119](https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).17119)). Penelitian Batubara dan Risna (2020) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas, partisipasi, dan pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah dengan konsep *value for money* (<https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.221>).

Selain itu, perkembangan teknologi informasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) turut mendukung pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Nasution dan Si (2021) menjelaskan bahwa penerapan SIPD mampu mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih terintegrasi dan sistematis (<https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>). Berdasarkan uraian tersebut, Teori Stewardship digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan peran BPKAD Kabupaten Tangerang sebagai *steward* yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel guna mendukung terwujudnya *good governance*.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pengalaman dan pengetahuan informan yang terlibat secara langsung dalam proses tersebut.

Penelitian dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada peran BPKAD sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan daerah serta bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan daerah, pengelolaan anggaran, dan penyediaan informasi publik terkait keuangan daerah.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan daerah. Informan penelitian terdiri atas Kasubag Umum dan Kepegawaian sebagai informan utama, serta Staf Bidang Akuntansi, Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Staf Bidang Anggaran, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPKAD Kabupaten Tangerang sebagai informan pendukung.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara dilakukan secara langsung kepada para informan pada tanggal 3 Juni 2026 untuk memperoleh informasi mengenai implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Tangerang. Selain wawancara, penelitian ini juga didukung oleh dokumentasi berupa foto kegiatan wawancara yang digunakan sebagai bukti pelaksanaan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data hasil wawancara yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk

memudahkan proses analisis. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari masing-masing informan, yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian, Staf Bidang Akuntansi, Operator SIPD, Staf Bidang Anggaran, dan PPID BPKAD Kabupaten Tangerang. Melalui teknik tersebut, data yang diperoleh dapat diuji kredibilitasnya sehingga hasil penelitian yang dihasilkan lebih dapat dipercaya.

4. Hasil Penelitian

A. Implementasi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Tangerang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BPKAD Kabupaten Tangerang, transparansi pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan melalui berbagai upaya yang bertujuan untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan, peneliti menemukan bahwa keterbukaan informasi menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Informasi mengenai keuangan daerah tidak hanya digunakan untuk kepentingan internal pemerintah, tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian menunjukkan bahwa BPKAD Kabupaten Tangerang berupaya memberikan akses informasi kepada masyarakat melalui berbagai media yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Informasi yang dapat diakses masyarakat di antaranya berupa laporan keuangan daerah, informasi mengenai anggaran, serta dokumen-dokumen lain yang termasuk dalam kategori informasi publik. Menurut informan, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, keterbukaan informasi juga menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

Peneliti juga menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu pendukung utama dalam pelaksanaan transparansi. Hal tersebut terlihat dari penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Operator SIPD,

sistem tersebut membantu proses pengelolaan data keuangan karena seluruh data tersimpan dalam satu sistem yang terintegrasi. Informan menjelaskan bahwa sebelum adanya sistem yang terintegrasi, proses pencarian data dan penyusunan laporan membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun setelah penggunaan SIPD, data yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan lebih cepat dan lebih mudah.

Selain memudahkan pengelolaan data, penggunaan SIPD juga membantu meningkatkan keteraturan dalam penyimpanan informasi keuangan daerah. Seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan dapat terdokumentasi dalam sistem. Menurut informan, kondisi tersebut memudahkan perangkat daerah dalam memperoleh data yang dibutuhkan dan meminimalkan terjadinya perbedaan data antarbidang. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti melihat bahwa penggunaan SIPD memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendukung keterbukaan informasi dan pengelolaan data keuangan daerah.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah juga didukung oleh keberadaan PPID di lingkungan BPKAD Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil wawancara dengan PPID, masyarakat dapat memperoleh informasi publik melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Informasi yang paling sering diminta oleh masyarakat berkaitan dengan laporan keuangan daerah, informasi anggaran, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah. Informan menjelaskan bahwa setiap permintaan informasi akan diproses sesuai prosedur yang berlaku dan terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap data yang diminta.

Menurut informan, sebelum informasi diberikan kepada masyarakat, PPID melakukan koordinasi dengan bidang yang menguasai data tersebut. Hal ini dilakukan agar informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, informasi yang dipublikasikan melalui media resmi pemerintah daerah juga diperbarui secara berkala agar masyarakat memperoleh informasi yang terbaru. Peneliti melihat bahwa koordinasi antarbidang menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Meskipun berbagai upaya transparansi telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu kendala yang sering dihadapi adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan daerah. Beberapa

informan menjelaskan bahwa dokumen keuangan daerah banyak menggunakan istilah dan bahasa teknis sehingga tidak seluruh masyarakat dapat memahami informasi tersebut dengan mudah. Kondisi ini menyebabkan informasi yang sebenarnya telah tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat.

Selain itu, terdapat pula beberapa informasi yang tidak dapat dipublikasikan secara bebas karena harus menyesuaikan dengan ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik. Informan menjelaskan bahwa terdapat batasan-batasan tertentu terkait informasi yang dapat diakses masyarakat. Oleh karena itu, BPKAD harus tetap memperhatikan aturan yang berlaku dalam memberikan informasi kepada publik. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti melihat bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Tangerang telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan agar keterbukaan informasi dapat berjalan lebih optimal.

B. Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Tangerang

Berdasarkan hasil penelitian, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Tangerang diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan, pengelolaan anggaran yang sesuai dengan prosedur, pelaksanaan pengawasan, serta tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan, peneliti menemukan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah telah memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Hasil wawancara dengan Staf Bidang Akuntansi menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Proses tersebut dimulai dari pencatatan transaksi keuangan oleh perangkat daerah, kemudian dilanjutkan dengan rekonsiliasi dan verifikasi data sebelum laporan keuangan disusun. Informan menjelaskan bahwa setiap data yang masuk harus diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kesesuaiannya dengan dokumen pendukung yang dimiliki. Hal ini dilakukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi keuangan daerah secara sebenarnya.

Menurut informan, penyusunan laporan keuangan daerah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam prosesnya, Bidang Akuntansi tidak hanya melakukan penyusunan laporan, tetapi juga melakukan

koordinasi dengan perangkat daerah lain apabila ditemukan perbedaan data. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti melihat bahwa proses penyusunan laporan keuangan dilakukan secara cukup hati-hati untuk menjaga kualitas dan keakuratan informasi yang disajikan.

Selain laporan keuangan, akuntabilitas juga terlihat dalam proses pengelolaan anggaran daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bidang Anggaran, setiap usulan kegiatan yang diajukan oleh perangkat daerah harus melalui proses pembahasan dan verifikasi sebelum dimasukkan ke dalam APBD. Informan menjelaskan bahwa proses tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dan sejalan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Apabila terdapat perubahan atau pergeseran anggaran, perubahan tersebut juga harus melalui prosedur yang telah ditentukan. Menurut informan, seluruh proses dilakukan secara bertahap mulai dari pengajuan, pembahasan, evaluasi hingga persetujuan. Dengan adanya mekanisme tersebut, setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Peneliti melihat bahwa proses penganggaran yang dilakukan menunjukkan adanya upaya untuk menjaga akuntabilitas dalam penggunaan keuangan daerah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan SIPD memberikan kontribusi dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan keterangan Operator SIPD, seluruh transaksi keuangan yang telah diinput ke dalam sistem dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan. Hal ini memudahkan proses pelaporan maupun pemeriksaan karena data yang dibutuhkan tersedia dalam sistem. Selain itu, penyimpanan data secara digital juga membantu menjaga keamanan dan ketersediaan informasi keuangan daerah.

Dalam pelaksanaan pengawasan, BPKAD Kabupaten Tangerang juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, pengawasan dilakukan melalui sistem pengendalian internal serta pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah pada periode berikutnya.

Menurut informan, setiap temuan yang diperoleh dari hasil audit akan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan. Tindak lanjut tersebut dilakukan

melalui koordinasi dengan bidang terkait agar permasalahan yang ditemukan dapat segera diselesaikan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti melihat bahwa pelaksanaan akuntabilitas di BPKAD Kabupaten Tangerang tidak hanya terlihat pada penyusunan laporan keuangan, tetapi juga pada upaya perbaikan yang dilakukan setelah adanya hasil pemeriksaan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Tangerang. Salah satu faktor yang paling banyak disebutkan oleh informan adalah penggunaan SIPD yang membantu proses pengelolaan data keuangan daerah menjadi lebih terintegrasi. Dengan adanya sistem tersebut, proses pencatatan, penyimpanan, dan pencarian data dapat dilakukan dengan lebih mudah dibandingkan sebelumnya.

Selain itu, keberadaan PPID juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan transparansi. Melalui PPID, masyarakat memiliki saluran yang jelas untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan. Dukungan teknologi informasi, regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, serta koordinasi antarbidang di lingkungan BPKAD juga menjadi faktor yang membantu pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas berjalan dengan baik.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat. Berdasarkan hasil wawancara, keterlambatan penyampaian data dari perangkat daerah masih menjadi salah satu kendala yang cukup sering terjadi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi proses penyusunan laporan maupun pengolahan data keuangan daerah. Selain itu, kendala teknis seperti gangguan jaringan dan sistem juga masih ditemukan dalam penggunaan SIPD.

Faktor penghambat lainnya adalah perbedaan kemampuan sumber daya manusia dalam memahami dan mengoperasikan sistem yang digunakan. Beberapa informan menjelaskan bahwa perkembangan teknologi yang cukup cepat menuntut adanya peningkatan kemampuan pegawai agar dapat mengikuti perubahan yang terjadi. Selain itu, masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan daerah juga

menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan transparansi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan daerah yang dipublikasikan.

5. Pembahasan

A. Implementasi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Teori Stewardship

Berdasarkan hasil penelitian, transparansi pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Tangerang diwujudkan melalui penyediaan informasi kepada masyarakat melalui website pemerintah daerah, layanan informasi publik yang dikelola oleh PPID, serta pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen BPKAD untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pelayanan publik dan pemenuhan hak masyarakat atas informasi.

Temuan tersebut dapat dianalisis menggunakan Teori Stewardship yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991). Teori ini menjelaskan bahwa aparatur pemerintah sebagai *steward* memiliki kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan organisasi dan kepentingan publik dibandingkan kepentingan pribadi. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, BPKAD berperan sebagai pihak yang diberikan amanah untuk mengelola sumber daya publik secara terbuka dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, keterbukaan informasi yang dilakukan oleh BPKAD dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan fungsi stewardship dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah dapat diakses oleh masyarakat melalui mekanisme yang telah disediakan. Keterbukaan tersebut mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran daerah. Temuan ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik sehingga masyarakat dapat mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik karena dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Selain itu, penggunaan SIPD yang diterapkan di BPKAD Kabupaten Tangerang menunjukkan adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung keterbukaan pengelolaan keuangan daerah. Sistem tersebut membantu proses pengelolaan data menjadi lebih terintegrasi sehingga informasi yang dibutuhkan dapat diakses dengan lebih cepat dan akurat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Amalina (2025) yang menjelaskan bahwa penerapan SIPD mampu meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi tata kelola pemerintahan daerah melalui digitalisasi proses administrasi dan pengelolaan data. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, proses penyediaan informasi kepada masyarakat maupun instansi terkait dapat dilakukan dengan lebih baik.

Keterbukaan informasi yang dilakukan oleh BPKAD juga menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Auditya et al. (2021) yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. Semakin terbuka informasi yang diberikan kepada masyarakat, maka semakin besar peluang terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan transparansi, terutama terkait pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan daerah yang cenderung bersifat teknis. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan tersedianya informasi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memahami informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, diperlukan penyajian informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami agar tujuan transparansi dapat tercapai secara optimal. Dalam perspektif stewardship, keterbukaan informasi yang mudah dipahami akan memperkuat hubungan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat sebagai pemilik kepentingan atas pengelolaan keuangan daerah.

B. Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Teori Stewardship

Berdasarkan hasil penelitian, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Tangerang diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pelaksanaan proses penganggaran yang mengikuti prosedur yang berlaku, serta adanya pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah telah memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan terstruktur.

Dalam Teori Stewardship, akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh *steward* kepada pihak yang memberikan amanah (Donaldson & Davis, 1991). Pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan publik memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan sumber daya yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan dilakukan melalui tahapan pencatatan, verifikasi, rekonsiliasi, hingga penyusunan laporan keuangan daerah. Proses tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan memiliki tingkat akurasi dan keandalan yang baik. Temuan ini sejalan dengan pendapat Nordiawan dan Hertianti (2019) yang menyatakan bahwa laporan keuangan sektor publik merupakan sarana pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga menjadi bentuk nyata akuntabilitas pemerintah daerah.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penganggaran daerah dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dan melibatkan proses verifikasi serta evaluasi sebelum ditetapkan dalam APBD. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran daerah dilakukan secara terencana dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik mengharuskan setiap organisasi sektor publik untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan penggunaan sumber daya kepada masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme penganggaran yang diterapkan BPKAD menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

Penggunaan SIPD juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas karena seluruh data keuangan dapat terdokumentasi secara sistematis dan dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ramadani et al. (2025) yang menyatakan bahwa implementasi SIPD berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan proses pelaporan dan pengawasan dilakukan secara lebih efektif sehingga meminimalkan risiko kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga tercermin dari adanya tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tindak lanjut tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa akuntabilitas tidak hanya diwujudkan melalui pelaporan, tetapi juga melalui kesiapan organisasi untuk melakukan evaluasi dan perbaikan atas kekurangan yang ditemukan selama proses pemeriksaan.

Selain itu, kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan akuntabilitas publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Leatemia dan Usmany (2021) yang menemukan bahwa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, akuntabilitas yang diterapkan oleh BPKAD tidak hanya berfokus pada penyusunan laporan keuangan, tetapi juga pada upaya memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Perspektif Teori Stewardship

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Tangerang didukung oleh beberapa faktor, antara lain penggunaan SIPD, dukungan teknologi informasi, keberadaan PPID, regulasi yang jelas, serta koordinasi antarbidang yang berjalan cukup baik. Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD sebagai pengelola keuangan daerah.

Dalam perspektif Teori Stewardship, faktor-faktor tersebut dapat dipandang sebagai instrumen yang membantu aparatur pemerintah menjalankan tanggung jawabnya

sebagai *steward* dalam mengelola sumber daya publik secara efektif dan bertanggung jawab (Donaldson & Davis, 1991). Dukungan sistem informasi yang memadai serta regulasi yang jelas memungkinkan aparat pemerintah melaksanakan tugasnya dengan lebih optimal sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Salah satu faktor pendukung yang paling dominan dalam penelitian ini adalah penggunaan SIPD. Sistem tersebut membantu proses pengelolaan data keuangan menjadi lebih cepat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Amalina (2025) yang menjelaskan bahwa penerapan SIPD mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, proses penyusunan laporan, penganggaran, maupun penyediaan informasi dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Selain SIPD, keberadaan PPID juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan transparansi karena berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan informasi publik. Keberadaan PPID menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat, seperti keterlambatan penyampaian data dari perangkat daerah, kendala teknis pada sistem informasi, serta perbedaan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi yang digunakan. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi transparansi dan akuntabilitas tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan koordinasi antarorganisasi.

Selain itu, masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan daerah juga menjadi tantangan dalam mewujudkan transparansi yang optimal. Informasi keuangan yang bersifat teknis sering kali sulit dipahami oleh masyarakat umum sehingga tujuan keterbukaan informasi belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem informasi, serta penyederhanaan penyajian informasi publik agar implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif. Dalam perspektif

stewardship, perbaikan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat menjalankan amanah masyarakat secara lebih optimal dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di BPKAD Kabupaten Tangerang, dapat diketahui bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sudah dilaksanakan melalui berbagai upaya yang mendukung keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Transparansi terlihat dari adanya penyediaan informasi kepada masyarakat melalui website pemerintah daerah, layanan PPID, serta pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sementara itu, akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan pengelolaan anggaran yang mengikuti prosedur, serta adanya pengawasan dan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas, seperti penggunaan SIPD, dukungan teknologi informasi, serta koordinasi antarbidang di lingkungan BPKAD. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, di antaranya keterlambatan penyampaian data dari perangkat daerah, kendala teknis pada sistem, dan masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan daerah. Meskipun demikian, secara keseluruhan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Tangerang sudah berjalan cukup baik dan terus diupayakan agar menjadi lebih optimal.

Daftar Pustaka

Astuti, H. P., Ilham, M., & Madjid, U. (2024). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di BPKAD Pemerintah Kota Tanjungpinang. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 10(1), 174-185.
[https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(1\).17119](https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).17119)

- Batubara, Z., & Risna, R. (2020). Pengaruh akuntabilitas, partisipasi dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 95-109. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.221>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of management*, 16(1), 49-64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Putri, E. V. B., Jati, B. P., & Grediani, E. (2025). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY. *VALUE*, 6(2), 522-537. <https://doi.org/10.36490/value.v6i2.2232>
- Manoe, M., Koten, Y., & Rozady, M. (2023). Efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan anggaran daerah pada BPKAD Kabupaten Sikka.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Nasution, M. I., & Si, N. M. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109-116. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). Digital Government Index 2019 Results. Paris: OECD Publishing.
- Rafael, R., Gamaliel, H., & Korompis, C. (2024). Transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis website dalam mendukung good governance.
- Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). (2025). Implementasi SIPD dan keterbukaan informasi publik di pemerintah daerah.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). Governance for Sustainable Human Development. New York: UNDP.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47. <https://doi.org/10.2307/259223>
- Amalina, N. (2025). Efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. *FORMULA: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 113–126. <https://doi.org/10.56013/fml.v2i2.5240>

- Auditya, L., Husaini, & Lismawati. (2021). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21–34. <https://doi.org/10.33369/fairness.v3i1.15274>
- Leatemia, S. Y., & Usmany, P. (2021). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 9(2), 139–148. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i2.5248>
- Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik* (3rd ed.). UPP STIM YKPN.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2019). *Akuntansi sektor publik* (2nd ed.). Salemba Empat.